

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2017
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: Rajawali Press, 2018
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: UGM Press, 2005.
- Efendi, A'an dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Fachruddin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004.
- Hadjon, Philipus M et.al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Ke- 11, Yogyakarta: UGM Press
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- HR, Ridwan. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- . *Hukum Administrasi di Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- . *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- dan Nurmalita Ayuningtyas Harahap. *Hukum Kepegawaian*, Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Murtir, Jeddawi. *Reformasi Birokrasi Kelembagaan dan Pembinaan PNS*, Yogyakarta: Total Media, 2008.

- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12, Jakarta: Kencana, 2016.
- Marbun, S.F. *Hukum Administrasi Negara II*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- . *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Cetakan Kelima, Yogyakarta: FH UII Press, 2015
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan PTUN di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung*: Mandar Maju, 2014.
- Nurtjahjo, Hendra. *Good Governance*, Surabaya: Insan Cendekia, 2001.
- Puspitosari, Hesti et.al. *Filosofi Pelayanan Publik, Buramnya Wajah Pelayanan Menuju Perubahan Paradigma Pelayanan Publik*, Malang: Setara Press, 2011.
- Projodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 1983.
- Rasjid, M. Ryass. *Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998.
- Situmorang, Victor M. dan Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: PTRineka Cipta, 1994.
- Sinambela, Lijan Poltak. *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- . *Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.

Yamin, Muhammad. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Yunas, Didi Nazmi. *Konsepsi Negara Hukum*, Padang: Angkasa Raya Padang, 1992.

Lotulung Paulus Efendi. *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Padang: Citra Aditya Bakti, 1993

## **B. Jurnal, Majalah, Makalah, Koran, Tesis dan Disertasi**

Adhar, Hakim “*Fungsi Dan Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat Dalam Mendorong Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan

Fahmi, Sudi. *Konsistensi Pengaturan Penyerahan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Pemberian Izin Pemanfaatan Hasil Hutan (Studi Desentralisasi Bidang Kehutanan Di Propinsi Riau)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2006.

Haposan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Sosiohumaniora, Volume 18 Nomor.2 Juli 2016.

Hasyim, Moh. *Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dengan Ombudsman*, Jurnal Ombudsman, Edisi 8, 2010.

Maleha Soemarsono, *Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37 No.2 April-Juni 2007.

Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16, 2009.

Radjab, Abi Ma'ruf. *Kekuatan Mengikat Putusan Ajudikasi Ombudsman dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik*, Jurnal Veritas et Justitia, Volume. 1, Nomor 2.

Rody Wahyudi et.al., “*Perilaku Maladministrasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau : Faktor Penyebab dan*

*Solusinya*”, No. 1, Volume 12, (2015),.

Suparman Marzuki, “*Komisi Ombudsman Daerah dan Good Governance*”,  
Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Edisi No. 22 Vol.10, (2003)

Hartono, Sunarti. Ombudsman sebagai lembaga penegak hukum dan pembela hak asasi manusia”, Makalah, Jakarta, 23-24 Agustus 1999

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207)

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian

Laporan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035)

Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tentang Pedoman Standar Pelayanan Nomor : 15 Tahun 2014, Tanggal 2 Mei 2014.

Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **D. Internet**

Datariau, <http://datariau.com/nasional/Rekomendasi-Ombudsman-Tidak-Dipatuhi-Pemerintah-Daerah> "Rekomendasi Ombudsman Tidak Dipatuhi Pemerintah Daerah".

DetikNews, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3330136/ombudsman-ri-keluhan-buruknya-layanan-pemda-paling-tinggi>, "Ombudsman akan Tegur Ahok karena Tak Jalankan Rekomendasi"

Kompasiana, [https://www.kompasiana.com/danielht/Rekomendasi-ombudsman-ri-tentang-kasus-gki-yasmin-bogor-apakah-akan-mampu-mengembalikan-hak-jemaat-untuk-beribadah-di-gerejanya\\_55010839a333118d73512658](https://www.kompasiana.com/danielht/Rekomendasi-ombudsman-ri-tentang-kasus-gki-yasmin-bogor-apakah-akan-mampu-mengembalikan-hak-jemaat-untuk-beribadah-di-gerejanya_55010839a333118d73512658), "Rekomendasi Ombudsman RI tentang Kasus GKI Yasmin, Bogor: Apakah mampu Mengembalikan Hak Jemaat Untuk beribadah di Gereja",

sublibrary.com <https://www.sublibrary.com/view?t=II+.+TINJAUAN+PUSTAKA+2.1.+Konsep+Pelayanan+Publik+2.1.1+...&u=http%3A%2F%2Fdigilib.unila.ac.id%2F3035%2F16%2FBAB%25202.pdf>.

<https://antikorupsi.Org/id/news/rekomendasi-ombudsman-ri>, "rekomendasiombudsmanri"

<https://www.pta-bengkulu.go.id>,

<http://faisalfarhan89.blogspot.com/2014/03/teori-hukum-jhon-austin.html>

